

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pertanian merupakan dunia yang dapat dikatakan sebagai sahabat manusia. Pertanian merupakan kegiatan-kegiatan yang meliputi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan. Di Indonesia pertanian memiliki arti dan peran penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran penting pertanian bagi seluruh rakyat Indonesia dikarenakan bidang pertanian merupakan pemasok utama kebutuhan pangan seluruh rakyat. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting perannya dalam perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa kita lihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian di dalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk (Lumintang, 2013:992).

Sejak lahir peradaban manusia, pertanian memainkan peran sebagai suatu kegiatan yang sangat esensial dalam menopang hidup dan kehidupan manusia. Sektor ini merupakan sektor satu-satunya sektor yang sangat bergantung pada sumberdaya lahan, air, iklim, dan ekosistem di sekitarnya. Dan dalam kerangka pembangunan nasional, mandat utama sektor pertanian adalah sebagai penyedia pangan yang cukup bagi penduduknya dan pendukung perkembangan sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, pembangunan pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih baik agar Indonesia dapat mempertahankan kondisi ketahanan pangan (Suryana, 2003:3).

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang kompleks, terdiri dari: subsistem ketersediaan terkait dengan upaya untuk peningkatan produksi pangan; subsistem distribusi tentang keberadaan pangan yang merata dan terjangkau di masyarakat, dan subsistem konsumsi tentang kecukupan pangan yang dikonsumsi masyarakat baik dalam jumlah maupun mutunya. Tujuan pembangunan ketahanan pangan bagi Indonesia akan lebih mudah dicapai jika adanya peningkatan produktivitas dan diversifikasi pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan hewan, buah dan sayuran. Namun hal ini belum juga menyelesaikan masalah ketahanan pangan di Indonesia karena secara bersamaan jumlah pertambahan

penduduk meningkat dengan cepat, inilah yang merupakan masalah baru dalam bidang ketahanan pangan (Hanafie, 2010:272).

Kebijakan di bidang ketahanan pangan merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi dalam membangun sistem ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada peningkatan sumberdaya manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Konsep ketahanan pangan berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 1996 pasal 1 ayat 17 menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Undang-undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah bersama masyarakat untuk bertanggungjawab dalam mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan yaitu dengan melaksanakan Program Desa Mandiri Pangan (Qorih dan Sumatri, 2008:4).

Program Desa Mandiri Pangan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin perdesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat khususnya bagi desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. Desa mandiri pangan dalam pemberdayaannya para masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi. Salah satu kriteria pemilihan Demapan adalah desa dengan tingkat kemiskinan tinggi (lebih besar dari 30%). Tingkat kemiskinan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dengan tingkat ketahanan pangan/rawan pangan. Dalam konteks pembangunan pertanian dan pedesaan, keduanya (ketahanan pangan dan kemiskinan) tidak dapat dipisahkan (Baihaqi, 2013:12).

Program Desa Mandiri Pangan di Provinsi Gorontalo sudah dimulai sejak tahun 2006, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di desa rawan pangan dengan fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui empat tahap, yaitu tahap

persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Melalui program tersebut diharapkan masyarakat desa rawan pangan akan kembali mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif setiap harinya. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan, serta tercapainya kemandirian masyarakat. Tujuan program Desa Mandiri Pangan adalah memberdayakan masyarakat miskin atau rawan pangan menjadi kaum mandiri melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, 2015:6).

Dalam pelaksanaannya, program Desa Mandiri Pangan difasilitasi dengan masukan antara lain: instruktur, pendampingan dalam bidang manajemen kelompok dan usaha serta teknis, bantuan permodalan, sarana dan prasarana, tenaga kerja serta teknologi. Berbagai masukan tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan seperti pemberdayaan masyarakat (pendampingan, pelatihan, fasilitasi dan penguatan kelembagaan), harmonisasi sistem ketahanan pangan dan pengembangan keamanan pangan serta antisipasi maupun penanggulangan kerawanan pangan. Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan dalam mengelola aspek ketersediaan dan distribusi pangan dengan gizi seimbang dan aman, dan mampu mengatasi masalah pangan serta mampu membentuk aliansi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melawan kelaparan dan kemiskinan, sehingga diharapkan dapat menurunkan kerawanan pangan dan gizi (Tolinggi *et al.*, 2012:2).

Di Provinsi Gorontalo, Program Desa Mandiri Pangan telah dilaksanakan sejak tahun 2006 di Kabupaten Gorontalo kemudian di tahun berikutnya

berkembang pada 4 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya mengenai identifikasi dampak program desa mandiri pangan yang telah dilakukan di Provinsi Gorontalo (tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, di Desa Batu Keramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango) melalui 6 instrumen dasar evaluasi yaitu instruktur, manajemen kelompok, permodalan, sarana prasarana, tenaga kerja dan teknologi serta penilaian terhadap dampak program desa mandiri pangan menunjukkan bahwa Desa Sukamaju berada pada peringkat pertama yang memiliki dampak terbesar dari program desa mandiri pangan terhadap masyarakatnya. Setelah itu disusul Desa Batu Keramat berada pada peringkat kedua yang memiliki dampak program desa mandiri pangan terhadap masyarakatnya. Selanjutnya Desa Dunggala, berada pada peringkat ketiga yang memiliki dampak program desa mandiri pangan terhadap masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani di Kabupaten Bone Bolango”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi program desa mandiri pangan di Kabupaten Bone Bolango ?
2. Bagaimanakah dampak program desa mandiri pangan terhadap peningkatan pendapatan petani yang ada di Kabupaten Bone Bolango ?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi program desa mandiri pangan di Kabupaten Bone Bolango.
2. Menganalisis dampak program desa mandiri pangan terhadap peningkatan pendapatan petani yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

D. Manfaat

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah, dapat dijadikan sebagai referensi dan masukan kepada pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan sistem ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mahasiswa, sebagai wahana penambah pengetahuan dan konsep keilmuan khususnya tentang implementasi program desa mandiri pangan terhadap pendapatan petani serta berkesempatan dapat menyajikan teori-teori yang berhubungan secara langsung di lapangan.